

Evaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online Dalam Meningkatkan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya

Emmanuela Wiji Marlia¹, Anggraeny Puspaningtyas², M. kendry Widiyanto³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: marliaemma2@gmail.com

Abstract. *In the city of Surabaya, a large number of female online ojek drivers face problems such as prejudice, non-disclosure, and dangerous working conditions. While there are laws against violence, the quantity of sexual incidents suggests a lack of consistency in their application. By providing skills development, legal support, and psychological counseling, the Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) initiative seeks to strengthen safety and self-determination for female online ojek drivers. This research uses descriptive qualitative methodology and collects data through observation, documentation, and interviews. William N. Dunn developed evaluation criteria for the GASPOL program, which include effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The GASPOL program met the needs of the participants, was efficient in using resources, and effective in improving the safety and competence of women drivers. In addition, the program was sensitive to feedback from participants and successfully distributed benefits equitably. Despite the success of the program, there are still challenges that influence public opinion, such as gender bias. To increase acceptance of women drivers, more outreach and education is needed.*

Keywords: *Women Empowerment, Online Ojek, Sexual Harassment, Program Evaluation, GASPOL*

Abstrak. Di kota Surabaya, sejumlah besar pengemudi ojek online perempuan menghadapi masalah seperti prasangka, penjelasan yang tidak terbuka, dan kondisi kerja yang berbahaya. Meskipun sudah ada undang-undang yang menentang kekerasan, kuantitas kejadian seksual menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penerapannya. Dengan memberikan pengembangan keterampilan, dukungan hukum, dan konseling psikologis, inisiatif Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) berusaha untuk memperkuat keamanan dan penentuan nasib sendiri bagi pengemudi ojek online perempuan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. William N. Dunn mengembangkan kriteria evaluasi untuk program GASPOL, yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keselarasan, daya tanggap, dan ketepatan. Program GASPOL telah sesuai dengan kebutuhan peserta, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan efektif dalam meningkatkan keselamatan dan kompetensi pengemudi perempuan. Selain itu, program ini juga peka terhadap masukan dari para peserta dan berhasil mendistribusikan manfaat secara merata. Terlepas dari keberhasilan program ini, masih terdapat tantangan yang mempengaruhi opini publik, seperti bias gender. Untuk meningkatkan penerimaan terhadap pengemudi perempuan, diperlukan lebih banyak penjangkauan dan edukasi.

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ojek Online, Pelecehan Seksual, Evaluasi Program, GASPOL

LATAR BELAKANG

Gender mengacu pada karakteristik dan perilaku laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat dan budaya. Laki-laki dan perempuan mempunyai sifat yang berbeda, perbedaan sifat maskulin dan feminim menimbulkan perbedaan peran, fungsi, dan status dalam segala bidang kehidupan. Perbedaan gender yang diwariskan secara turun-menurun memberikan perempuan peran fungsi, dan status sosial budaya yang ada di masyarakat. Perbedaan gender tersebut terkait dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki masing-masing gender. Perbedaan gender

Received: Mei 15, 2024; Accepted: Juni 20, 2024; Published: September 30, 2024

* Emmanuela Wiji Marlia, marliaemma2@gmail.com

menyebabkan terciptanya peran gender yang menimbulkan ketidakadilan pada suatu kelompok, seringkali merugikan perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan.

Di Surabaya, terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Sayangnya masih banyak orang bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan hal yang sangat wajar, bahkan ada yang masih menyalahkan korban. Akibatnya, banyaknya korban yang ragu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Selain itu, korban sering menghadapi tantangan dalam menemukan saluran yang tepat untuk melaporkan pengalaman mereka. Layanan pengaduan dan dukungan tidak mudah diakses, baik karena jarak geografis, kendala keuangan, atau keterbatasan waktu. Otoritas hukum yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus pelecehan seksual sering kali gagal dalam menangani kasus-kasus ini dengan baik, sehingga ini hanya akan menambah keberanian para pelaku dan menghilangkan rasa jera. Terlepas dari kenyataan bahwa kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan, banyaknya kejadian yang tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kekerasan.

Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) di Kota Surabaya merupakan inisiatif penting dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Inisiatif ini karena tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam industri transportasi online seperti pelecehan seksual, diskriminasi, dan kondisi kerja yang tidak aman. GASPOL hadir sebagai permasalahan dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, dan dukungan mental kepada para perempuan pengemudi ojek online.

Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK). Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan perempuan ojek online di Jawa Timur. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti: pengajian, ibadah, bela diri jujitsu, memasak, merajut, kelas politik dan hukum.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik menurut ahli William N Dunn teori kebijakan publik William N Dunn adalah seorang akademi yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang kebijakan publik. Karyanya membahas konsep dan metode yang membantu memahami proses, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dalam metode evaluasi kebijakan yang diciptakan oleh William N Dunn, enam kriteria utama digunakan untuk menilai kebijakan publik. Kriteria individu dijelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Efektivitas: Sejauh mana kebijakan ini mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Analisis efektivitas ini menunjukkan seberapa dekat suatu program dapat mencapai hasil yang diinginkan.
2. Efisiensi: Sejauh mana kebijakan ini menggunakan sumber daya secara efisien. Penilaian efisiensi ini menilai seberapa baik kebijakan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan: Sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat yang memadai kepada masyarakat sasaran. Penilaian kecukupan menilai apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki situasi.
4. Keadilan: Sejauh mana kebijakan ini mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Penilaian keadilan menilai sejauh mana kebijakan tersebut memperlakukan semua pihak yang terkena dampak secara setara.
5. Daya Tanggap (Responsiveness): Sejauh mana kebijakan ini mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Penilaian daya tanggap ini menilai sejauh mana kebijakan ini dapat merespons perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat.
6. Kesesuaian (appropriateness): Sejauh mana kebijakan ini cocok untuk menyelesaikan permasalahan atau upaya yang ada. Penilaian kesesuaian merupakan penilaian sejauh mana ukuran tersebut mampu secara memadai menyelesaikan permasalahan atau situasi yang ingin dipecahkan.

Keenam indikator ini bersatu untuk memberikan kerangka kerja yang menyeluruh dalam mengkaji dan mengembangkan kebijakan publik yang efisien dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Teori William N. Dunn dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik program Gerakan Cinta Perempuan Ojek Online digunakan untuk lebih memahami variabel-

variabel yang mempengaruhi dan cara kerja kebijakan publik terkait. Hal ini dapat mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Berdasarkan penilaian William N. Dunn di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan proses kebijakan yang paling penting karena memungkinkan kita untuk mengukur tingkat kebutuhan, nilai, dan kesempatan untuk tindakan publik yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan tertentu, untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan menawarkan alternatif kebijakan baru atau melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut. Menurut William N. Dunn (*William N Dunn (2003:608-609)*, n.d.) evaluasi memiliki atribut-atribut yang membedakannya dengan pendekatan-pendekatan lain dalam analisis kebijakan:

1. *Fokus pada nilai*. Tidak seperti pemantauan, evaluasi berpusat pada penentuan kebutuhan atau nilai dari suatu program atau kebijakan.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Persyaratan evaluasi didasarkan pada "nilai" dan "fakta".
3. *Orientasi pada Masa Lalu dan Masa Kini*. Tuntutan advokasi difokuskan pada tujuan masa depan; tuntutan evaluatif, di sisi lain, difokuskan pada hasil masa lalu dan masa kini.
4. *Dualitas nilai*. Sifat ganda dari nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi berasal dari persepsi mereka sebagai sarana dan tujuan. (Approach, 2016)

Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukanlah fase terakhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik diimplementasikan dengan maksud tertentu, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari masalah yang sudah ada sebelumnya. Karena tidak semua program kebijakan publik memberikan hasil yang diinginkan, maka diperlukan evaluasi. Kebijakan publik sering kali gagal mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penilaian kebijakan adalah untuk menentukan apakah kebijakan publik yang telah dilakukan telah memberikan dampak yang diinginkan atau untuk memeriksa alasan di balik kegagalan kebijakan. Secara lebih ringkas, evaluasi adalah proses menentukan "manfaat" dari suatu program. Menurut Bloom & Reenen (2013), evaluasi yang komprehensif memiliki tiga definisi, yaitu

1. Evaluasi awal, yang dikenal sebagai "evaluasi ex-ante," dilakukan selama fase perumusan kebijakan dan sebelum implementasi
2. Penilaian selama proses implementasi atau observasi
3. Evaluasi ex-post, atau penilaian akhir, dilakukan setelah proses implementasi kebijakan selesai (ex post evaluation). (Bloom & Reenen, 2013)

Nilai adalah informasi yang diperoleh dari evaluasi dan berkaitan dengan hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Efisiensi (*Efficiency*), yang merupakan rasio biaya terhadap hasil, atau hasil/biaya.
2. Keuntungan (*Profitabilitas*), yang didefinisikan sebagai selisih antara biaya dan hasil
3. Efektif (*effectiveness*), atau mengevaluasi hasil tanpa memperhitungkan biaya
4. Keadilan (*equity*), yaitu keseimbangan proporsional dalam alokasi hasil (manfaat) dan/atau pengeluaran (pengorbanan)
5. Destriments, khususnya indikator sosial yang tidak menguntungkan seperti kejahatan
6. Manfaat ekstra (*marginal rate of return*), yaitu hasil ekstra relatif terhadap pengeluaran atau konsesi (*change-in benefits/change - in-cost*). (ARANI, 2006)

Model-Model Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn kemudian menyatakan bahwa terdapat dua komponen utama dalam evaluasi kebijakan: penerapan seperangkat nilai untuk memastikan kegunaan hasil dan penggunaan berbagai teknik untuk menelusuri hasil dari kebijakan dan program publik. Selain itu, Dunn membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga kategori: "sebelum implementasi," "selama implementasi," dan "setelah implementasi" tergantung pada lamanya periode evaluasi. Evaluasi proses adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan evaluasi yang terjadi selama implementasi kebijakan; evaluasi konsekuensi kebijakan (*output*), evaluasi dampak kebijakan (*outcome*), atau evaluasi sumatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan evaluasi yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan. Dunn menciptakan tiga metode untuk menilai penerapan kebijakan: penilaian formal, evaluasi keputusan teoritis, dan evaluasi kuasi. Berikut ini adalah beberapa metode yang disarankan Dunn untuk evaluasi kebijakan:

- a. Evaluasi Semu. Evaluasi semu merupakan teknik yang, tanpa bermaksud meragukan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut bagi individu, kelompok, atau masyarakat luas, menggunakan metodologi deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan. Asumsi dasar dari evaluasi kuasi adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai adalah sesuatu yang tidak kontroversial atau sudah terbukti dengan sendirinya. Desain kuasi-eksperimental, survei, pengambilan sampel acak, dan pendekatan statistik merupakan beberapa metodologi yang sering digunakan oleh para analis dalam evaluasi semu untuk menjelaskan perbedaan hasil kebijakan sebagai akibat

dari variabel input proses. Namun demikian, semua hasil kebijakan yang ada saat ini hanya diakui sebagai tujuan yang tepat.

- b. Evaluasi Formal (Formal Assessment). Strategi ini menggunakan teknik-teknik deskriptif untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan. Meskipun demikian, tujuan program yang telah dinyatakan secara formal oleh para pembuat kebijakan dan administrator program menjadi dasar evaluasi. Evaluasi formal beroperasi di bawah premis utama bahwa tujuan dan tolok ukur yang dinyatakan dengan cara ini merupakan indikator yang sesuai untuk menilai nilai atau manfaat kebijakan program.
- c. Evaluasi keputusan teoritis. Strategi evaluasi ini menggunakan metodologi deskriptif untuk menghasilkan data mengenai hasil-hasil kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum dan dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Dalam teori keputusan, tujuan dan sasaran dari tindakan kebijakan yang baik merupakan asumsi evaluasi, yaitu apa yang secara eksplisit dinyatakan atau secara implisit ditunjukkan merupakan ukuran yang sah dari nilai atau manfaat kebijakan program. William N. Dunn, seorang akademisi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap studi kebijakan publik, menyatakan dalam Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory). Tulisan-tulisannya mencakup berbagai ide dan pendekatan yang membantu dalam memahami perumusan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan publik.

Dari ketiga metode yang disebutkan Dunn di atas dapat disesuaikan untuk digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi keputusan teoritis tampaknya lebih sesuai sebagai kerangka kerja untuk penelitian ini dijadikan kerangka penelitian ini. (Kawengian & Rares, 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor penghambat dan evaluasi program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) di Kota Surabaya, menurut pendapat (Bogdan dan Taylor, 2013) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan manusia dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Kriteria evaluasi William N. Dunn, yang terdiri dari enam kategori evaluasi kebijakan-efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan di dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder

merupakan sumber data penelitian, dan metode untuk mengumpulkan data termasuk melakukan wawancara, melakukan pengamatan, dan pencatatan. Para peneliti menggunakan tahapan model Miles dan Huberman untuk analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari penelitian lapangan, bahwa program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) di Kota Surabaya, program GASPOL ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kemampuan perempuan yang bekerja dalam ojek online melalui berbagai kegiatan termasuk advokasi, penjangkauan, pengembangan keterampilan, dan pendampingan. Program GASPOL memiliki beberapa indikator keberhasilan yang dijabarkan melalui teori evaluasi kebijakan publik William N Dunn, yaitu:

1. Efektivitas. Program ini dianggap efektif dalam mencapai tujuannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan bela diri (jujitsu), rias wajah, merajut, serta kelas politik dan hukum, berhasil meningkatkan kapasitas perempuan pengemudi ojek online dalam hal keselamatan, keamanan dan keterampilan kewirausaha.
2. Efisiensi. Dari segi efisiensi, program ini dinilai baik karena mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. Program ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggota GASPOL, seperti peningkatan pendapat dan keterampilan.
3. Kecukupan. Program GASPOL cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan perempuan pengemudi ojek online. kegiatan yang beragam mampu menjawab berbagai aspek kebutuhan, mulai dari perlindungan hingga pemberdayaan ekonomi.
4. Perataan. Program ini berhasil memberikan manfaat secara merata kepada semua anggota GASPOL tanpa diskriminasi. Semua perempuan pengemudi ojek online yang mengikuti program mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.
5. Responsivitas. Program ini responsif terhadap kebutuhan perempuan pengemudi ojek online. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK) aktif mengevaluasi dan menyesuaikan kegiatan berdasarkan umpan balik dari anggota GASPOL untuk memastikan program ini tetap relevan dan bermanfaat.
6. Ketepatan. Program ini tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang dihadapi perempuan pengemudi ojek online, seperti diskriminasi, kekerasan, dan kesulitan ekonomi.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online, Yaitu:

- a. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini antara lain adalah dukungan dari pemerintah daerah, antusiasme anggota GASPOL, dan kerjasama dengan berbagai Lembaga swadaya masyarakat yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan program ini juga didukung oleh komitmen DP3AK dalam memberikan pendampingan dan advokasi kepada anggota GASPOL.
- b. Meskipun program ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan seperti prasangka gender yang masih ada di masyarakat, yang kadang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap pengemudi perempuan. Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

Evaluasi program GASPOL ini berdasarkan teori tersebut yang menunjukkan bahwa program ini cukup berhasil dalam meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online di Kota Surabaya. Kegiatan yang beragam dan tepat sasaran mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi anggota GASPOL, baik dari segi peningkatan keterampilan, keamanan, maupun kesejahteraan ekonomi. Walaupun program GASPOL berhasil dalam banyak aspek, prasangka gender dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pengemudi perempuan, yang pada akhirnya dapat menghambat penilaian objektif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat diperlukan untuk mengurangi prasangka ini dan meningkatkan penerimaan terhadap pengemudi perempuan.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online Dalam Meningkatkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Di Kota Surabaya

Di kota Surabaya, inisiatif Gerakan Perempuan Cinta Ojek Online (GASPOL) berupaya untuk memperkuat keselamatan dan kemandirian pengemudi ojek online perempuan. Namun, ada banyak tantangan dalam pelaksanaan program ini, yang mengurangi efektivitasnya. Implementasi program GASPOL mengungkapkan sejumlah hambatan, termasuk yang berikut ini:

1. Kurangnya kerja sama di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi kebijakan dan program terhambat karena kurangnya kerja sama antara pemerintah, organisasi perempuan, dan penyedia layanan ojek online. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang diinginkan dengan pelaksanaannya. Terhambatnya arus informasi dan bantuan yang diperlukan untuk pelaksanaan program yang efektif.
2. Kurangnya dana dan sumber daya. Kurangnya sumber daya, baik keuangan maupun manusia, menyulitkan untuk mendukung berbagai kegiatan program. Banyak inisiatif

yang tidak dapat diperluas atau dijalankan tanpa pendanaan yang memadai. Terbatasnya kapasitas untuk membekali perempuan pengemudi ojek online dengan fasilitas, konseling, dan pelatihan yang dibutuhkan.

3. Hambatan Infrastruktur dan Teknologi. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur terkait sulit, sehingga menyulitkan penggunaan program-program untuk layanan ojek daring yang aman dan pelaporan yang efektif. membatasi kemampuan pengemudi perempuan untuk menangani keadaan darurat dan perjalanan di jalan raya dengan cara yang efisien.
4. Kurangnya pengetahuan dan instruksi tentang hak-hak mereka, cara melaporkan kekerasan, dan cara menangani keadaan yang berpotensi membahayakan. Hal ini membuat pengemudi perempuan tidak berdaya menghadapi pelecehan dan penipuan, dan tidak memiliki alat yang berguna untuk membela diri.
5. Kesenjangan Kesempatan dan Pendapatan. Kesenjangan kesempatan dan pendapatan antara pengemudi penuh waktu dan paruh waktu, serta antara pengemudi laki-laki dan perempuan, menghalangi perempuan pengemudi ojek online untuk mencapai emansipasi ekonomi.

Dibutuhkan kerja keras untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar program GASPOL dapat berjalan dengan baik dan melayani sebanyak mungkin perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online di Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengevaluasi Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) yang dibentuk oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek online di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Efektivitas program: program GASPOL telah menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas, perlindungan, dan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek online. kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan keterampilan, sosialisasi, advokasi, dan pendampingan berhasil memberikan dampak positif bagi para anggota GASPOL.
- B. Efisiensi dan Kecukupan: program ini dijalankan dengan efisiensi yang baik, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Selain itu, program ini cukup memadai dalam memenuhi berbagai kebutuhan perempuan pengemudi ojek online, dari aspek keselamatan hingga peningkatan keterampilan ekonomi.
- C. Perataan dan Responsivitas: GASPOL berhasil memberikan manfaat yang merata tanpa diskriminasi kepada seluruh anggota GASPOL. Program ini juga responsif terhadap kebutuhan para perempuan pengemudi ojek online, dengan aktif melakukan evaluasi dan penyesuaian kegiatan berdasarkan umpan balik yang diterima.

- D. Ketepatan Sasaran: program ini tepat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh perempuan ojek online, seperti diskriminasi, kekerasan, dan kesulitan ekonomi, serta memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat.
- E. Faktor Pendukung dan Penghambat: keberhasilan program didukung oleh berbagai faktor seperti dukungan pemerintah, antusiasme anggota GASPOL, dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, tantangan yang dihadapi antara lain prasangka gender di masyarakat dan keterbatasan dana serta sumber daya.

Pada penulisan akhir ini peneliti memberikan saran terkait dari hasil Kesimpulan di atas, supaya evaluasi program GASPOL untuk meningkatkan pelaksanaan dan keberhasilannya. Beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi prasangka gender dan meningkatkan penerimaan terhadap perempuan pengemudi ojek online. kampanye kesetaraan gender dapat membantu mengubah persepsi negative dan mendukung pengemudi perempuan.
2. Pemerintah daerah dan DP3AK meningkatkan alokasi anggaran untuk program ini. Selain it, menjalin kemitraan dengan sektor Lembaga donor dapat membantu menyediakan sumber daya yang lebih memadai.
3. Program pelatihan keterampilan perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Menambahkan pelatihann teknologi digital dan kewirausahaan dapat membantu amggota GASPOL untuk lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
4. Evaluasi dan monitoring program perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Umpan balik dari anggota GASPOL harus diolah dan dijadikan dasar untuk penyesuaian kegiatan program GASPOL.

DAFTAR REFERENSI

- ARANI, S. A. (2006). *Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area*. 44(2), 8–10.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Kawengian, D. D. V., & Rares, J. J. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanganan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Perda Nomor 1 Tahun 2004). *E-Journal "Acta Diurna,"* 4(5), 1. <https://mataram.antaranews.com/berita/19352/kendaraan-bermotor-penyumbang-terbesar-pencemaran-udara-di-mataram>
- William N Dunn (2003:608-609). (n.d.). https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1557/5/151801097_file_5.pdf